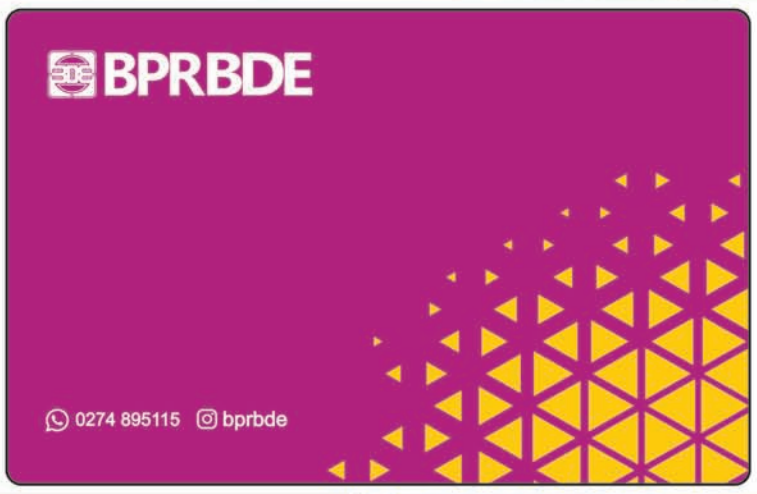

SELAMA 24 HARI BEKERJA

Satgas TPPO Selamatkan 1.861 Korban

JAKARTA (KR) - Sejak resmi dibentuk 4 Juni lalu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri tingkat Bareskrim dan Polda jajaran terus melakukan penindakan dan penyelamatan korban, terhitung selama 24 hari sebanyak 1.861 korban TPPO diselamatkan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebut, Satgas TPPO Polri melakukan penindakan sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5-28 Juni 2023 jumlah korban TPPO sebanyak 1.861 orang," kata Ramadhan, Jumat (30/6).

Selama periode itu pula, Satgas TPPO Polri menerima 578 laporan polisi yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Dari laporan tersebut, Satgas TPPO Polri pusat dan daerah yang bergerak melakukan penanganan menangkap sebanyak 668 orang tersangka.

Adapun modus TPPO yang banyak terjadi korban direkrut untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Satgas TPPO Polri mencatat ada 412 modus operandi PRT, 167 modus operandi dijadikan pekerja seks komersial (PSK), 41 modus operandi eksploitasi anak dan sembilan modus operandi anak buah kapal (ABK).

Ramadhan menjelaskan, salah satu kasus TPPO modus PRT diungkap Polda Jabar. Pelaku berinisial AS mempekerjakan korban berinisial A sebagai PRT, lalu menawarkannya untuk bekerja di Uni Emirat Arab juga sebagai PRT dijanjikan dengan gaji besar.

"Korban menerima tawaran tersebut dan setelah melalui prosedur. Setelah itu korban diterbangkan bukan ke Dubai melainkan ke Suriah, selama bekerja di Suriah korban tidak mendapatkan gaji," ujar Ramadhan.

Polri, kata Ramadhan, menemukan dugaan TPPO pada seorang korban berinisial RS yang diberangkatkan Agen Pekerja Migran untuk bekerja di negara Arab Saudi. Setelah bekerja selama empat bulan korban mendapatkan pelecehan seksual oleh anak majikannya dan tidak diberikan hak atau gajinya secara penuh. "Korban diberikan setengah gaji yang dijanjikan, selanjutnya korban dipulangkan ke Indonesia," ucap Ramadhan.

Kasus TPPO berikutnya di Polda Jatim mengamankan pemilik warung kopi berinisial H, atas dugaan menyediakan jasa melayani PSK sekaligus terdapat kamar-kamar di dalam warung tersebut. Dalam pengungkapan tersebut ditemukan sebanyak tiga PSK berinisial M, SJ dan F. Ketiganya disewa dengan tarif sebesar Rp 100.000 dan pemilik warung mendapat keuntungan Rp 25.000 sebagai penyedia kamar.

(Ant)-d

CEGAH LAKA LAUT SAAT LIBURAN

Wisatawan Waspadai Palung

YOGYA (KR) - Selama masa libur sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY melalui Satlinmas Rescue Istimewa DIY melakukan pemantauan di 33 titik. Meski dari 33 titik lokasi pemantauan tersebut tidak ditemukan kasus kecelakaan laut, namun pengawasan tetap diintensifkan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Memang sampai saat ini masih aman dan belum ada laporan kecelakaan laut. Tapi pemantauan tetap kami lakukan secara intensif. Dari beberapa titik lokasi pemantauan selama masa liburan sekolah kali ini, Pantai Parangtritis yang paling banyak didatangi wisatawan. Di pantai tersebut, kami menyiagakan 69 petugas yang siap melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar kawasan pantai tersebut," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Jumat (30/6).

Selain Satpol PP DIY, pengawasan juga dilakukan Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan beberapa relawan. Noviar mengatakan, guna mengantisipasi kecelakaan laut, pihaknya melakukan sejumlah antisipasi. Salah satunya dengan mengimbau wisatawan untuk mewaspadai palung yang berada di sejumlah lokasi di Pantai Selatan DIY. Dari beberapa kejadian yang ada, kecelakaan laut paling tinggi terjadi di Pantai Parangtritis. Sebagian besar kecelakaan itu terjadi karena wisatawan nekat beraktivitas di sekitar palung.

"Sejumlah upaya sudah kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut. Salah satunya dengan meminta wisatawan untuk mematuhi imbauan dan peringatan petugas. Seperti memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu yang sudah ada. Misalnya jika ada bendera merah, berarti tidak boleh berenang di situ, karena ada palungnya," tegas Noviar.

(Ria)-f

PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR

Panglima : Negosiasi Tetap Opsi Utama

JAKARTA (KR) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan negosiasi masih menjadi opsi utama untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang diculik oleh kelompok separatis (KKB/KST) di Papua. Negosiasi itu juga mengedepankan peran masyarakat sipil seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam (Panglima Daerah Militer) Cendrawasih dan Pangkogabwilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) III. Ya, kami tetap mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melaksanakan negosiasi," kata Panglima TNI di sela-sela kegiatannya di Mabes Polri Jakarta, Jumat (30/6).

Pemerintah Indonesia dan TNI, lanjutnya, tetap meyakini kekerasan atau kontak senjata bukan jalan terbaik untuk membebaskan pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru itu. "Ya kami tidak mau berhadapan dengan tadi, kekerasan senjata, karena nanti dampaknya pasti kepada masyarakat. Sehingga kami tempuh jalan negosiasi melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat," kata Laksamana Yudo.

Oleh karena itu, Panglima TNI meminta masyarakat menunggu hasil negosiasi tersebut. "Yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj. Bupati Nduga. Ya, kita tunggu saja," kata Panglima TNI.

(Ant/Has)-f